KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Naikin Subsidi Pupuk 2x Lipat
**Tanggal** : Jumat, 14 Januari 2022
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 7

Harapan Cak Imin

# Naikin Subsidi Pupuk 2x Lipat



Muhaimin Iskandar

WAKIL Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menyebut, petani merupakan ujung tombak masa depan pangan Indonesia. Ironisnya, para petani saat ini menjerit akibat melonjaknya harga pupuk nonsubsidi mencapai 100 persen.

"Pemerintah harus bergerak cepat mengatasi persoalan ini. Caranya, naikkan subsidi hingga dua kali lipat, serta menata distribusi pupuk yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita," ujar Gus Muhaimin-sapaan Abdul Muhaimin Iskandar, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan harga pupuk nonsubsidi bakal mengalami kenaikan sepanjang tahun 2022. Hal ini akibat melonjaknya harga bahan baku di tingkat global. Kenaikan harga pupuk pun ikut andil mempengaruhi inflasi pada komoditas pangan awal tahun ini.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) Isy Karim mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan produsen lokal untuk menjaga harga pupuk nonsubsidi tetap stabil di tengah gejolak harga dunia.

Dia menargetkan, produsen dalam negeri dapat memberikan harga di bawah harga internasional untuk menjaga akses pupuk bagi petani.

Kenaikan harga pupuk nonsubsidi disebabkan oleh melonjaknya harga berbagai komoditas dunia seperti amonia, phosphate rock, KCL, gas dan minyak bumi.

"Ini disebabkan oleh pandemi, krisis energi di Eropa serta adanya kebijakan beberapa negara yang menghentikan ekspornya," kata Isy Karim, Minggu (9/1).

Melanjutkan keterangannya, Gus Muhaimin mengatakan, sampai hari ini distribusi pupuk belum mencapai 50 persen dari kebutuhan subsidi yang harusnya diproduksi. Karenanya, DPR akan memanggil kementerian terkait untuk menelusuri musabab persoalan tersebut.

"Mau tidak mau, DPR akan melakukan penelusuran melalui berbagai kementerian. Dengan begitu, ada langkah-langkah anggaran yang tidak abai terhadap tuntutan yang sudah lama membuat menderita para petani kita," jelasnya.

Sementara, kelangkaan pupuk nampaknya sudah lama tidak ditangani dengan sungguh-sungguh.

Padahal, banyak petani menyampaikan aspirasi terkait persoalan itu kepada Presiden Jokowi, di antaranya saat kunjungan di Indramayu.

"Kondisi ini menjadi pertanda, harus adanya *emergency action* dari Pemerintah. Persoalan ini memerlukan penanganan sistematis, agar keluhan para petani tidak berkepanjangan," cetus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dia juga mendorong berbagai kementerian, seperti Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan beraoordinasi dan merumuskan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Ironi ini harus dihentikan, karena (kelangkaan pupuk) terjadi 10 tahun atau 15 tahun terakhir ini," tandasnya. ■ ONI